

**EVALUASI PROGRAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
(Studi Kasus; Nagari Kasang)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Perencanaaa Wilayah Dan Kota  
Strata Satu (S1)*

**Oleh :**

**WANDA SYAFUTRA  
1210015311017**

**Pembimbing I : Harne Julianti Tou, ST, MT**

**Pembimbing II : Tomi Eriawan, ST, MT**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Nama** : Wanda Syafutra  
**Npm** : 1210015311017  
**Pembimbing I** : Harne Julianti Tou, ST., MT  
**Pembimbing II** : Tomi Eriawan, ST., MT

### **ABSTRAK**

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat, pemerintah pusat sendiri telah mengupayakan pemerataan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Pemerintah berharap dengan adanya penetapan program prioritas, desa dapat memanfaatkan dana desa dengan program yang sesuai prioritasnya, dan dapat mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian evaluasi kualitatif yang bersifat deskriptif, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologik, yaitu memungkinkan untuk mengungkap realita yang mendeskripsikan situasi secara komprehensif dengan konteks yang sesungguhnya tentang efektifitas pelaksanaan program penggunaan dana desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengevaluasi program prioritas desa yang menggunakan dana desa dan mekanisme dalam menentukan program berdasarkan peraturan yang ada. Keluaran yang diharapkan dari dilakukan penelitian ini adalah hasil evaluasi dan pengendalian dari program prioritas sudah sesuai atau belum dengan peraturan dan pedoman yang ada. Adapun kesimpulan dari penelitian terkait mekanisme penetapan program prioritas tingkat kesesuaian 63,6% (rendah), menentukan program prioritas penggunaan dana desa tingkat kesesuaian 58,8% (rendah) dan realisasi pelaksanaan kegiatan program prioritas penggunaan dana desa tingkat realisasi 88,9% (tinggi).

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran .....	3
1.3.1 Tujuan Studi .....	3
1.3.2 Sasaran Studi .....	3
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi.....	4
1.4.2 Ruang Lingkup Materi .....	7
1.4.3 Batasan Studi.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan .....	8
1.5.2 Metode Pengumpulan Data .....	8
1.5.3 Metode Analisis.....	10
1.6 Keluaran .....	15
1.6.1 Kerangka Berfikir.....	16
1.7 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II     STUDI LITERATUR .....</b>	<b>19</b>
2.1 Pengertian Desa.....	19
2.1.1 Pengertian Desa Menurut Undang-Undang .....	19
2.1.2 Pengertian Desa Menurut Para Ahli.....	20
2.2 Klasifikasi Desa .....	20
2.2.1 Klasifikasi Desa Menurut Aktifitasnya .....	20
2.2.2 Desa Menurut Ikatanya .....	21

2.3	Tipologi Desa .....	22
2.4	Ciri-ciri Masyarakat Desa .....	23
2.5	Pola Persebaran desa .....	24
2.6	Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang ) Desa .....	25
2.7	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara .....	27
2.8	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.2. Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa .....	28
2.9	Mekanisme Dan Ketentuan Penetapan Program Prioritas Menurut Permendes No.22 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2017.....	29
2.9.1	Ketentuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	29
2.9.2	Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	32
2.9.3	Program Prioritas Permendes No.22 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2017.....	36
2.10	Pengertian Evaluasi.....	42
2.11	Teori Konsep Evaluasi .....	44
2.12	Pengertian Evaluasi Program dan Program .....	45
2.13	Tahap Evaluasi.....	47
2.14	Teknik Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Desa.....	48
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>53</b>
3.1	GAMBARAN UMUM WILAYAH .....	53
3.1.1	Kondisi Fisik .....	53
3.1.2	Kependudukan.....	57
3.1.3	Sosial Budaya .....	57
3.1.4	Perekonomian.....	58
3.1.5	Sarana .....	59
3.1.6	Prasarana .....	62
3.2	Karakteristik Nagari Kasang.....	64

3.2.1	Nagari Menurut Aktivitasnya.....	64
3.2.2	Nagari Menurut Ikatanya .....	64
3.2.3	Pola Persebaran Permukiman Nagari Kasang .....	65
3.2.4	Tipologi Nagari Kasang .....	65
3.3	Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Kasang .....	65
3.3.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Penyusun RKP Nagari Kasang 2017.....	65
3.3.2	Usulan Prioritas Program Masing-Masing Korong.....	69
3.3.3	Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari Yang Dikelola Dalam Skala APB Nagari Tahun 2017.....	73
3.3.4	Program Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang 2017 .....	74

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS EVALUASI PROGRAM PENGGUNAAN DANA DESA NAGARI KASANG .....</b>	<b>78</b>
4.1	Evaluasi Tahapan Proses Musrembang, Prioritas Program Nagari dan Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Dikelola Skala Nagari Kasang.....	78
4.1.1	Penilaian Proses Tahapan Pelaksanaan Musrembang Nagari Kasang .....	78
4.1.2	Penilaian Jumlah Usulan Yang Dijadikan Prioritas Program Nagari .....	80
4.1.3	Penilaian Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Dikelola Skala Nagari Kasang .....	82
4.2	Analisis Evaluasi Program Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	87
4.2.1	Evaluasi Penilaian Mekanisme Penetapan Program Prioritas .....	87
4.2.2	Evaluasi Penilaian Dalam Menentukan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	93
4.2.3	Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang .....	106

4.3	Kesimpulan Evaluasi Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang.....	114
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
5.1	Kesimpulan .....	117
5.2	Saran.....	119
5.3	Manfaat Penelitian .....	119

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penilaian Evaluasi Program Prioritas Desa.....	15
Tabel 2.1	Program Prioritas Dana Desa Tahun 2017.....	36
Tabel 2.2	Variabel Penilaian Mekanisme Penetapan Program Prioritas.....	40
Tabel 2.3	Variabel Penilaian Kesesuaian Program Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	41
Tabel 2.4	Tahapan Pelaksanaan Berdasarkan Siklus Perencanaan.....	47
Tabel 2.5	Klasifikasi Perhitungan Berdasarkan Rating Skala .....	51
Tabel 3.1	Luas Daerah Nagari Kasang Menurut Korong Tahun 2017 .....	55
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Nagari Kasang Tahun 2017 .....	57
Tabel 3.3	Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Kasang .....	59
Tabel 3.4	Jumlah Sarana Peribadatan di Nagari Kasang .....	60
Tabel 3.5	Jumlah Sarana Kesehatan di Nagari Kasang .....	61
Tabel 3.6	Prioritas Program Usulan Kegiatan Korong Nagari Kasang .....	70
Tabel 3.7	Program Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang 2017 .....	75
Tabel 4.1	Perbandingan Proses Tahapan Pelaksanaan Musrembang Nagari Kasang.....	78
Tabel 4.2	Penilaian Jumlah Usulan Yang Dijadikan Prioritas Program Nagari .....	80
Tabel 4.3	Penilaian Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Dikelola Skala Nagari .	83
Tabel 4.4	Penilaian Program Menggunakan Dana Desa.....	86
Tabel 4.5	Variabel Penilai Mekanisme Penetapan Program Prioritas .....	88
Tabel 4.6	Analisis Tingkat Kesesuaian Mekanisme Penetapan Program Prioritas Nagari Kasang.....	90
Tabel 4.7	Klasifikasi Perhitungan Berdasarkan Rating Skala .....	92
Tabel 4.8	Penilaian Dalam Menentukan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	94
Tabel 4.9	Penilaian Tujuan Kegiatan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang.....	95
Tabel 4.10	Penilaian Berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	97
Tabel 4.11	Penilaian Dalam Menentukan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang.....	100
Tabel 4.12	Klasifikasi Perhitungan Berdasarkan Rating Skala .....	105
Tabel 4.13	Penilaian Manfaat dan Kendala Program Prioritas Penggunaan Dana Desa	107
Tabel 4.14	Penilaian Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang.....	113

Tabel 4.15	Klasifikasi Perhitungan Berdasarkan Rating Skala .....	113
Tabel 5.1	Hasil Evaluasi Proses Prioritas Program Nagari Kasang.....	116
Tabel 5.2	Hasil Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang tahun 2017	117



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Orientasi Kawasan Studi.....	5
Gambar 1.2	Peta Administrasi Nagari Kasang.....	6
Gambar 1.3	Kerangka Pemikiran .....	17
Gambar 3.1	Peta Adm Nagari Kasang.....	54
Gambar 3.2	Diagram Luas Nagari kasang 2017.....	55
Gambar 3.3	Sarana Pendidikan Di Nagari Kasang.....	60
Gambar 3.4	Sarana Peribadatan.....	61
Gambar 3.5	Sarana Kesehatan.....	62
Gambar 3.6	Sumber Air Bersih .....	62
Gambar 3.7	Jaringan Listrik .....	63
Gambar 3.8	Persampahan .....	63
Gambar 3.9	Kondisi Jalan.....	64
Gambar 3.10	Bagan Alir Proses Musrembang Nagaari Kasang.....	68
Gambar 3.11	Peta pelaksanaan kegiatan di Nagari Kasang Tahun 2017 .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh negara. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalam membangun lingkungan daerahnya masing-masing. Pada intinya, pembangunan pedesaan merupakan salah satu bagian dari program pemberdayaan masyarakat di daerah.

Pedesaan di Indonesia biasanya memiliki ciri agak tertinggal bila dibandingkan dengan perkotaan, baik secara ekonomi maupun dalam hal aspek lainnya, seperti: pembangunan, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak pihak yang telah dilibatkan dalam hal pengupayaan perbaikan mutu kehidupan masyarakat di sana, namun tetap saja hal tersebut tidak memberi dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat desa tersebut. Terkadang hal itu menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat desa. Hal ini pula yang membuat masyarakat desa pindah ke kota atau terjadinya urbanisasi, akibat ketimpangan dalam pembangunan, karena terkadang ada program yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat desa, namun hasilnya justru tidak dinikmati oleh masyarakat desa tersebut.

Pemerintah pusat sendiri telah mengupayakan pemerataan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, didalam peraturan tersebut telah dijelaskan bagaimana proses mekanisme penetapan program prioritas, serta telah dilampirkan program prioritas apa saja yang mesti diutamakan berdasarkan tipologi desa. Pemerintah berharap dengan adanya penetapan program prioritas, desa dapat memanfaatkan dana desa dengan program yang sesuai prioritasnya, dan dapat mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Akan tetapi perlu adanya evaluasi terkait program prioritas penggunaan dana desa apakah mekanisme dan pemilihan program prioritas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukanya pengendalian dan evaluasi sehingga diketahui proses telah sesuai dengan peraturan yang ada maka peneliti mengambil salah satu desa yang ada di indonesia yaitu Nagari Kasang, pemilihan Nagari Kasang berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Menetapkan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nagari Kasang termasuk salah satu desa yang di prioritaskan dalam pembangunan.

Nagari Kasang masuk bagian administrasi Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang mana status perkembanganya berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi termasuk kategori desa berkembang dengan indeks 73,22. Nagari Kasang merupakan salah satu desa sasaran prioritas pembangunan desa sehingga perlu dilakukan evaluasi program prioritas penggunaan dana desa, evaluasi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga perlunya dilakukan evaluasi program prioritas yang dilakukan dengan menggunakan dana desa Nagari Kasang, serta mengidentifikasi potensi dan masalah Nagari Kasang. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tugas akhir yaitu ***“Evaluasi Prioritas Program Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlunya evaluasi terkait program prioritas Penggunaan Dana Desa, Apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

## **1.3 Tujuan dan Sasaran**

### **1.3.1 Tujuan Studi**

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengevaluasi program prioritas desa yang menggunakan dana desa dan mekanisme dalam menentukan program berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 serta realisasi pelaksanaan program.

### **1.3.2 Sasaran Studi**

Adapun sasaran dalam evaluasi program prirotas dana desa Nagari Kasang ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai mekanisme penetapan program prioritas Nagari Kasang.
2. Evaluasi/Menilai perbandingan kesesuaian program prioritas Nagari Kasang dengan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.
3. Eevaluasi realisasi pelaksanaan program prioritas Nagari Kasang.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi**

Ruang lingkup penelitian berada pada administrasi Nagari Kasang yang memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut;

- ❖ Sebelah Utara : Nagari Sungai Buluh
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Koto Tengah
- ❖ Sebelah Timur : Nagari Katapiang dan Nagari Sungai Buluh
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Koto Tengah

Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah studi dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.1      Peta Orientasi Kawasan Studi**

**Gambar 1.2      Peta Administrasi Nagari Kasang**

### **1.4.2 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi penelitian dalam studi ini meliputi, Menilai mekanisme penetapan program prioritas Nagari Kasang, Evaluasi/Menilai perbandingan kesesuaian program prioritas Nagari Kasang dengan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017* dan evaluasi realisasi pelaksanaan program prioritas Nagari Kasang.

### **1.4.3 Batasan Studi**

Batasan studi pada penelitian ini dibatasi oleh:

- Batasan studi dibatasi oleh fokus penelitian prioritas program didalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2017 Nagari Kasang
- Kemudian untuk fokus kajian difokuskan prioritas program yang pembiayaan yang bersumber dari dana dikelola dalam skala Nagari dilihat dari APB Nagari 2017 program yang bersumber dari dana desa hanya untuk bidang pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat.
- Setelah itu, dilakukan analisa perbandingan proses tahapan musrembang antara pedoman dengan eksisting, usulan program masyarakat yang dijadikan prioritas program Nagari Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran bersumber dari dana desa, Mekanisme penetapan program, ketentuan penetapan program dan realisasi pelaksanaan prioritas program, analisis dilakukan dengan perbandingan dan penilaian berdasarkan Pedoman penyelenggaraan musrembang dan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang



terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian ini juga lebih mengutamakan pada proses daripada hasil. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna.

Penilaian evaluasi pelaksanaan program prioritas dana desa menggunakan Metode Model evaluasi yang digunakan adalah *Stake's Countenance Model, Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation University of Illinois*, evaluasi *outcome* merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan evaluasi. Metode ini hanya dapat dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan dan hasil dari evaluasi *outcome* ini dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan bagi program yang akan datang.

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Penelitian evaluasi kualitatif yang bersifat deskriptif, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologik, yaitu memungkinkan untuk mengungkap realita yang mendeskripsikan situasi secara komprehensif dengan konteks yang sesungguhnya tentang efektifitas pelaksanaan program penggunaan dana desa.

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Studi ini dapat berupa pengumpulan data-data primer dan sekunder berdasarkan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### **❖ Survei Sekunder**

Survei ini dilakukan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar maupun BPS Kabupaten Padang Pariaman. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data-data mengenai Nagari Kasang. Selanjutnya survei dilakukan ke Kantor Wali Nagari Kasang, survei ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang dokumen dan program prioritas penggunaan dan desa, serta melengkapi kelengkapan data yang tidak ditemukan dari BPS.

## ❖ **Survei Primer**

### **A. Observasi**

Survei primer /melakukan observasi berupa peninjauan langsung ke lokasi kawasan studi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi eksisting dilapangan dan mengetahui program yang telah terlaksana dan belum terlaksana.

### **B. Wawancara**

Melakukan wawancara adalah satu metode yang digunakan dalam survei primer, diantaranya untuk mendapatkan atau mengetahui proses atau mekanisme Nagari Kasang menetapkan program prioritas. Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak/stakeholder yang bersangkutan seperti Wali Nagari Kasang, perangkat Nagari Kasang, Wali Korong dan niniak mamak Nagari Kasang.

## ❖ **Cara Pengumpulan Data**

Tahapan persiapan survei merupakan langkah awal dalam suatu perencanaan. Tahapan ini bertujuan untuk mempermudah dalam tahap pengumpulan data, baik data yang berasal dari survei primer maupun survei sekunder. Dalam tahapan persiapan survei ini dilakukan beberapa tahap.

### **A. Tahap Persiapan**

- Tahapan Studi Pendahuluan (Studi Literatur), Pada tahap pengumpulan studi literatur ini diperlukan teori-teori yang akan di jadikan acuan dalam evaluasi program prioritas penggunaan dana Desa.
- Alat kebutuhan survei, sebagai penunjang dan mempermudah dalam melakukan survei, alat-alat itu seperti kamera, peta dasar dan keperluan lainnya.

### **B. Tahap Survei**

Berbeda dengan survey primer, survey sekunder ini adalah survei yang di lakukan ke instansi dengan perolehan berupa data sekunder, termasuk juga di dalamnya literatur dan standar-standar. Adapun data

sekunder yang dibutuhkan dalam evaluasi program prioritas penggunaan dana desa ini adalah :

1. RKP Nagari Kasang 2017

Dokumen RKP Nagari Kasang, untuk mengetahui program prioritas penggunaan dana desa dibutuhkan untuk menilai dan evaluasi terkait program yang ada di Nagari Kasang.

2. RAPB Nagari Kasang 2017

Dokumen RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) Nagari Kasang.

3. Profil Nagari Kasang

Profil Nagari Kasang untuk mengetahui tipologi Nagari Kasang, dibutuhkan untuk mengetahui program prioritas yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan tipologi desa.

### **1.5.3 Metode Analisis**

Teknik analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah, analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan Model evaluasi yang digunakan adalah *Stake's Countenance Model, Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation University of Illinois*, dengan cara menggambarkan dan membandingkan serta menilai kesesuaian program dengan menggunakan *Skala Ordinal*. Untuk melakukan evaluasi menggunakan model Stake (Countenance) dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

1. Pengumpulan data

Evaluator mengumpulkan data mengenai prioritas program yang bersumber dari dana desa. Data dapat dikumpulkan melalui studi dokumen dapat pula melalui wawancara.

2. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan meliputi analisis logis. Analisis logis diperlukan dalam memberikan pertimbangan mengenai prioritas program Nagari Kasang baik dari tahapan pemilihan program hingga realisasi pelaksanaannya. Sehingga dapat menentukan apakah prasyarat awal yang

telah dikemukakan program akan tercapai dengan rencana yang dikemukakan.

### 3. Analisis *congruence* (kesesuaian)

Analisis *congruence* (kesesuaian) merupakan analisis, dimana evaluator membandingkan antara apa yang dikemukakan oleh peraturan dan pedoman terkait prioritas program dana desa dan pedoman penyelenggaraan musrembang desa (inten) dengan apa yang terjadi di Nagari Kasang (observasi). Dalam hal ini evaluator menganalisis apakah yang telah direncanakan dalam tujuan telah sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan atau terjadi penyimpangan.

Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik skoring yang merupakan teknik dalam menganalisis data dengan memberikan nilai terhadap keadaan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Teknik skoring dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis kesesuaian prioritas program Nagari kasang bersumber dari dana desa.

Berdasarkan hasil penilaian kondisi nyata di lapangan dengan ketetapan program prioritas (teori) yang ada, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai skor kesesuaian antara kondisi nyata di lapangan dengan ketetapan perencanaan (teori) dimana tingkat kesesuaian tersebut relevan dengan kesesuaiannya.

Sedangkan metode penilai menggunakan skala ordinal disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan obyek yang diukur menurut karakteristik tertentu, sehingga untuk mengetahui kesesuai dalam membandingkan antara mekanisme dan ketentuan dalam menentukan prioritas program perlu menggunakan skala ordinal untuk nilainya.

Adapun analisis/kajian yang akan evaluasi penggunaan dana desa Nagari Kasang h sebagai berikut:

#### **A. Penilaian Tahapan Pelaksanaan Musrembang Nagari Kasang**

Evaluasi yaitu membandingkan proses tahapan pelaksanaan musrembang nagari kasang dengan pedoman pelaksanaan musrembang desa, analisis ini dilakukan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan musrembang nagari kasang telah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan musrembang desa

#### **B. Penilaian Jumlah Usulan Yang Dijadikan Prioritas Program Nagari**

Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan usulan prioritas program dari masyarakat korong dengan prioritas program yang tertuang di dokumen RKP Nagari Kasang 2017, sehingga diketahui jumlah program yang diusulkan menjadi prioritas Nagari Kasang.

#### **C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Dikelola Nagari Kasang**

Penilaian Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Dikelola Nagari Kasang dilakukan dengan cara membandingkan prioritas program nagari dengan program APB Nagari yang dilaksanakan tahun 2017, sehingga diketahui apakah seluruh prioritas program dilaksanakan seluruhnya pada anggaran 2017.

#### **D. Mekanisme Penyusunan Program Prioritas Dana Desa**

Dalam evaluasi program prioritas ini, dilakukan dengan analisis penilaian yang telah disusun variabel terkait mekanisme penetapan program berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Terdapat 5 (lima) variabel penilai dalam mekanisme penetapan program prioritas yaitu:

1. Tahap Musyawarah Desa
2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

3. Tahap Penetapan RKP Desa
4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa
5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Untuk mendapatkan skor dalam mekanisme penyusunan prioritas program dana desa sesuai dengan peraturan yang ada maka digunakan skala 3 tingkat (skala ordinal) dengan pilihan sangat sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai dengan ketentuan skor sebagai berikut:

Sangat sesuai : 3

Menyatakan bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang sangat sesuai dengan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.

Kurang sesuai : 2

Menyatakan bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang kurang sesuai dengan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.

Tidak sesuai : 1

Menyatakan bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan teori *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.

#### **E. Analisis Penilaian Program Prioritas Dana Desa**

Data yang dibutuhkan yaitu indikasi program program prioritas Desa Nagari Kasang. Dalam evaluasi program prioritas ini, dilakukan dengan analisis perbandingan antara program prioritas dana desa Nagari Kasang dengan variabel penilai berdasarkan

ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam menetapkan program prioritas desa. Terdapat 5 (lima) variabel penilai dalam ketentuan penetapan program prioritas yaitu;

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat
3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
4. Prioritas Berdasarkan Kepasatian Adanya Pengawasan
5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Untuk mendapatkan skor dalam dalam penilaian prioritas program dana desa sesuai dengan peraturan yang ada maka digunakan skala 2 tingkat (skala ordinal) dengan pilihan sesuai, dan tidak sesuai dengan ketentuan skor sebagai berikut:

Sangat sesuai : 2

Menyatakan bahwa program ini merupakan prioritas yang sangat sesuai dengan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.

Tidak sesuai : 1

Menyatakan bahwa program ini merupakan tidak sesuai dengan teori *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.

#### **F. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Progam Prioritas Nagari Kasang**

Data yang dibutuhkan yaitu indikasi program program prioritas Desa Nagari Kasang, Selanjutnya program prioritas dana desa Nagari Kasang dinilai tingkat kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan cara melakukan pembobotan dan dan pemberian skor sehingga diketahui capaian realisasinya. Berikut ini dijelaskan pembagian persentase interval nilai realisasi kinerja dan kriteria penilaian realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi.

**Tabel 1.1**  
**Penilaian Evaluasi Program Prioritas Desa**

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016*

Dalam Penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

## 1.6 Keluaran

Adapun keluaran yang diharapkan dari dilakukan penelitian ini adalah hasil evaluasi dan pengendalian dari program prioritas sudah sesuai atau belum dengan peraturan dan pedoman yang ada. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat

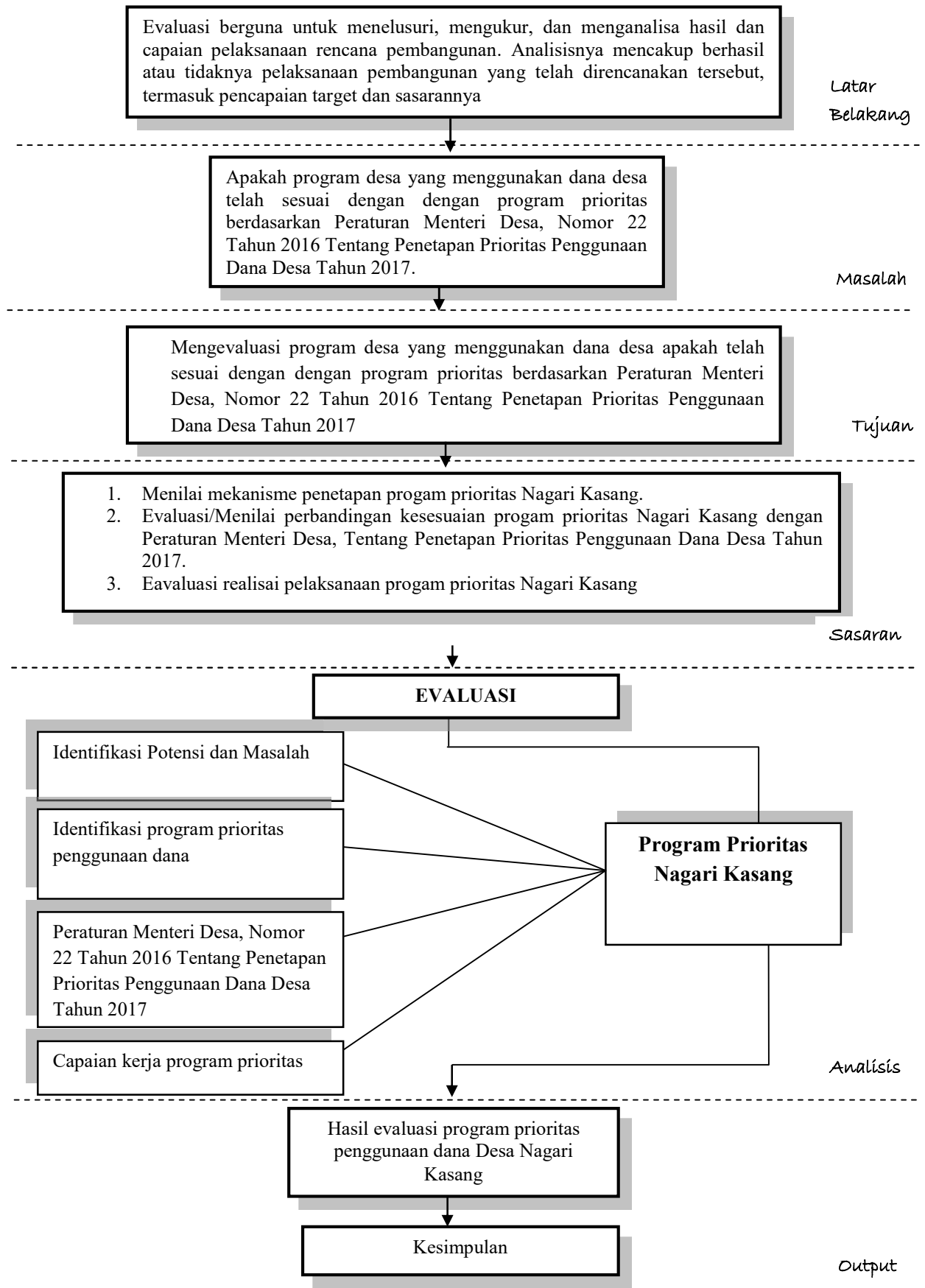


dijadikan bahan untuk pemerintah daerah sebagai metode untuk pengendalian dan evaluasi keberhasilan program desa.

### **1.6.1 Kerangka Berfikir**

Dalam melakukan kegiatan Studi perlu adanya suatu kerangka pemikiran studi sebagai acuan atau gambaran dalam melakukan penelitian guna memberi kemudahan dalam melakukan pengajian terhadap semua pembahasan secara garis besar. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dalam studi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Pemikiran**



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam studi Evaluasi Program Pelaksanaan Musrembang Nagari Kasang adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, metodologi penulisan, kerangka penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II STUDI LITERATUR**

Bab ini berisikan mengenai tentang landasan teori tentang pengertian desa dan perdesaan, bentuk dan perkembangan desa, pengertian evaluasi, teori evaluasi, manfaat evaluasi, teknik evaluasi.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN STUDI**

Memberikan deskripsi wilayah studi di Nagari Kasang mengenai kondisi umum Nagari Kasangyang mencakup wilayah administrasi, data kependudukan. Menyajikan informasi program prioritas dana desa.

### **BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MUSREMBANG DESA**

Menyampaikan hasil evaluasi terkait penilaian kesesuaian program prioritas Nagari Kasang dengan Permendes serta evaluasi pelaksanaan program musrembang desa, serta realisasi pelaksanaan program.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil evaluasi program prioritas penggunaan dana desa Nagari Kasang.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan atau menyimpulkan secara keseluruhan pembahasan yang dikaji dalam studi ini. Studi ini membahas tentang Evaluasi Prioritas Program Penggunaan Dana Desa Kabupaten Padang Pariaman studi kasus Nagari Kasang

### 5.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi prioritas penggunaan dana desa Nagari Kasang tahun 2017 yang telah dilakukan, yaitu menilai proses tahapan musrembang, jumlah usulan yang dijadikan prioritas program nagari, dan Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Dikelola Skala Nagari Kasang sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

**Tabel 5.1**  
**Hasil Evaluasi Proses Prioritas Program Nagari Kasang**

No.	Aspek		Kesimpulan Penilaian
1.	Proses Tahapan Pelaksanaan Musrembang Nagari Kasang	Penilaian yang dilakukan pada Tahapan Pelaksanaan Musrembang Nagari Kasang, dengan membandingkan proses tahapan dari <i>Pedoman penyelenggaraan Musrembang Desa</i>	Berdasarkan hasil perbandingan dapat ditarik kesimpulan untuk proses pra musrembang dan pasca musrembang telah sesuai dengan pedoman, sedang untuk pelaksanaan musrembang ada tahapan yang tidak dilaksanakan seperti diskusi dengan narasumber dan melakukan musyawarah untuk menentukan tim delegasi.
2.	Jumlah Usulan Yang Dijadikan Prioritas Program Nagari	Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui Jumlah Usulan Yang Dijadikan Prioritas Program Nagari	Masing-masing Korong mengusulkan prioritas program, dari semua usulan, untuk bidang pembangunan Nagari, 10 program yang dijadikan prioritas program Nagari, sedangkan untuk pemberdayaan, tidak ada yang dijadikan prioritas program Nagari.
3.	Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Dikelola Skala Nagari Kasang	Penilaian yang dilakukan terkait prioritas program dilaksanakan pada tahun 2017.	Dari 10 prioritas program pembangunan Nagari terdapat 1 program yang tidak ada di APB Nagari 2017 yaitu program Pembangunan Pasangan Batu Kali Korong Guci, sedangkan untuk program pemberdayaan masyarakat, dari 6 prioritas program, 3 program tidak memiliki anggaran.

*Sumber: Hasil Penilaian, 2018*

Selain menilai proses musrembang tersebut, juga dilakukan penilaian kesesuaian terkait mekanisme Mekanisme Penetapan Program Prioritas, menentukan program prioritas penggunaan dana desa, dan realisasi pelaksanaan kegiatan program prioritas penggunaan dana desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.2**  
**Hasil Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Nagari Kasang tahun 2017**

No.	Aspek	Variabel	Nilai	Nilai Akhir
1.	Mekanisme Penetapan Program Prioritas	Kesesuaian mekanisme dengan <i>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017</i>	63,6%	(Total Skor/ skor terbesar) X 100 Nilai Kesesuaian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat Tinggi 91% ≤ 100%</li> <li>• Tinggi 76 % ≤ 90%</li> <li>• Sedang 66 % ≤ 75%</li> <li>• <b>Rendah 51% ≤ 65%</b></li> <li>• Sangat Rendah ≤ 50</li> </ul>
2.	Menentukan program prioritas penggunaan dana desa	Kesesuaian program dengan <i>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017</i>	58,8%	Total Skor/ skor terbesar) X 100 Nilai Kesesuaian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat Tinggi 91% ≤ 100%</li> <li>• Tinggi 76 % ≤ 90%</li> <li>• Sedang 66 % ≤ 75%</li> <li>• <b>Rendah 51% ≤ 65%</b></li> <li>• Sangat Rendah ≤ 50</li> </ul>
3.	Realisasi pelaksanaan kegiatan program prioritas penggunaan dana desa	Realisasi jumlah program penggunaan dana desa yang telah terlaksana tahun 2017	88,9%	Total Skor/ skor terbesar) X 100 Nilai Kesesuaian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat Tinggi 91% ≤ 100%</li> <li>• <b>Tinggi 76 % ≤ 90%</b></li> <li>• Sedang 66 % ≤ 75%</li> <li>• Rendah 51% ≤ 65%</li> <li>• Sangat Rendah ≤ 50</li> </ul>

Sumber : Hasil Penilaian, 2018

Berdasarkan ketiga aspek diatas tabel diatas dalam menentukan program prioritas penggunaan dana desa dan mekanisme penetapan program prioritas dari keseluruhan indikator telah terpenuhi, ada beberapa indikator penilai yang tidak terpenuhi sehingga untuk kesesuaian dengan peraturan yang ada memiliki skor rendah, sedangkan untuk realisasi pelaksanaan memiliki skor sangat tinggi dari 9 kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana akibat kendala dilapangan. Selain itu terdapat temuan bahwa kegiatan yang menggunakan dana desa lebih banyak untuk alokasi fisik dari pada pemberdayaan masyarakat, dari 9 kegiatan 1 (satu) kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan tersebut bukan prioritas program Nagari Kasang.

## **5.2 Saran**

Untuk lebih mengoptimalkan program prioritas penggunaan dana desa baik itu dari mekanisme, penetapan, dan realisasi pelaksanaan program sehingga perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Wali Nagari Kasang mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Nagari, sehingga masyarakat juga mengetahui RAPB Nagari Kasang.
2. Pemilihan kegiatan tidak hanya kegiatan fisik, perlu kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat memberikan pelatihan bagi masyarakat.
3. Dukungan kegiatan ekonomi bagi masyarakat seperti Pemilihan kegiatan yang mampu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.
4. Kegiatan yang mendukung sektor unggulan pertanian seperti, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos, Pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian, Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian.
5. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
6. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas

## **5.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Sebagai bahan untuk pemerintah baik Kabupaten dan Nagari, untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk pengendalian proses pelaksanaan tahun berikutnya
- c. Hasil tentang tidak tepatnya program yang dipilih pembiayaanya menggunakan dana desa dapat jadi pertimbangan bagi perencanaan untuk tahun berikutnya.
- d. Informasi hasil penilaian yang diperoleh dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari, yang dilakukan pemerintah Nagari sudah memenuhi peraturan dan pedoman yang ada atau belum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dharma 2010. *Evaluasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  
<https://www.scribd.com/document/373452420/Evaluasi> (diakses tanggal 1 Maret 2018)
- Akbar, Firyal 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)* Ideas Publishing, Gorontalo.
- Dewi, Silvia 2013. *Rancangan Evaluasi Program Model STAKE*.  
<https://yudistiadewisilvia.wordpress.com> (diakses 1 Maret 2018)
- Ilmu Geografi 2017 *Klasifikasi Desa- Potensi dan ciri-ciri Desa* <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/klasifikasi-desa> (diakses pada 15 Februari 2018)
- Ilmu Geografi 2017 *Desa Menurut Aktifitasnya*, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/klasifikasi-desa> (diakses tanggal 15 Februari 2018)
- Stufflebeam, Daniel L. "The CIPP Model For Evaluation, dalam Daniel L. Stufflebeam, dkk. (eds), *Evaluation in Education and Human Service*, Boston: Kluwer Academic Publisher, 2002
- Malindo, Andhi. 2011. *Pengertian tentang Desa*  
<https://malindoandhi.wordpress.com/2011/04/25/pengertian-urban-rural-urban-sprawldll/> (diakses pada 2 April 2018)
- Updesa, *Pengertian desa menurut para ahli* <https://updesa.com/pengertian-des/> (diakses Pada Februari 2018)
- Ilmu Geografi 2017 *Desa Menurut Aktifitasnya*, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/klasifikasi-desa> (diakses tanggal 15 Februari 2018)
- Seknas Fitra, 2015. *Musyawah Perencanaan dan Pembangunan Desa*, <https://info-anggaran.com/ensiklopedia/musyawah-perencanaan-dan-pembanguna-des/> (diakses tanggal 15 Februari 2018)
- Junaidi, 2015. *Memahami Skala-Skala Pengukuran*,  
[https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37753720/skala\\_junaidi2015.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37753720/skala_junaidi2015.pdf)  
(diakses tanggal 19 Juli 2018)

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.



*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*

*Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.2. Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*

*Peraturan Menteri Dalam Negri No 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi*

*Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Kedeputian Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2009*

*Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.22. Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

*Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*

*Panduan Penyelenggaraan Musrembang Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2008*